

## **SKIRPSI**

### **PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PASAR PEKANBARU (STUDI KASUS PASAR SENAPELAN)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensif  
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru**



**Oleh:**

**RIO SAPUTRA  
10576002270**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2010**

## **ABSTRAK**

### ***Perencanaan Dan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru ("Studi Kasus Pasar Senapelan")***

***Oleh***

***Rio Saputra***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru studi kasus pasar/pemerintah kota dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru untuk itu, permasalahan penelitian yang di rumuskan adalah bagaimana perencanaan dan implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga penelitian adalah Penelitian Deskriptif, lokasi penelitian yaitu di Dinas Pasar Kota Pekanbaru, untuk mengetahui penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar Senapelan yaitu Jl. Teratai oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Serta pedagang kaki lima di pasar Senapelan Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel penelitian adalah 10 orang aparatur pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang ditentukan Teknik Purposive Sampling, serta 25 orang atau 10% dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru, yang ditentukan dengan teknik random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner dan proses wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen dan laporan yang ada di Dinas Pasar serta sumber data lain yang telah tersedia di instansi tersebut. Setelah data penelitian di kumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif. Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah masih kurang efektif. Perencanaan dan implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain adalah: (a) Aparatur Pemerintah yang bertugas sebagai pengawas penertiban fungsional di Dinas Pasar masih kurang memiliki kemampuan kerja yang memadai di bandingkan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi dan objek para pedagang yang akan ditertibkan, serta jumlahnya relative sedikit dibandingkan jumlah pedagang yang di awasi. (b) Rencana kerja yang disusun dengan perencanaan penertiban pedagang Kaki Lima kurang efektif dan efisien sehingga tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam kegiatan perencanaan penertiban, dan (c) masih rendahnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memenuhi kebijakan penertiban yang telah ditetapkan Pemerintah Kota untuk penataan dan pembinaan lingkungan tempat usaha para pedagang tersebut.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penulisan .....	12
1.5 Sistem Penulisan .....	12
 <b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	14
2.1.1 Pemerintah Dalam Menentukan Kebijakan PKL .....	14
2.1.2 Kebijakan Pemerintah .....	17
2.1.3 Perizinan .....	20
2.1.4 Kerangka Berfikir .....	23
2.2 Hipotesis .....	24
2.3 Variabel Penelitian .....	25
2.4 Operasional Variabel .....	26
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian .....	35
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.4 Populasi dan Sample Penelitian .....	36
3.5 Teknik Analisis Data .....	37
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS PASAR KOTA PEKANBARU</b>	
4.1 Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru .....	38
4.2 Struktur Organisasi Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru .....	38
 <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Ode mtotas Responden .....	43
5.2 Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru (studi kasus pasar senapelan) .....	56
5.2.1 Penertiban Langsung .....	47
5.2.2 Penertiban Melalui Laporan .....	52
5.2.3 Penertiban dengan Kebijakan Khusus .....	56

5.3 Kendala yang Dihadapi Dinas Pasar Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru .....	61
--	----

## **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	63
6.2 Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Hampir setiap hari di media masa, baik cetak maupun elektronik memuat berita mengenai pengusuran atau penertiban PKL. Pedagang disini berkepentingan untuk mencari nafkah demi kepentingan hidup. Namun disisi lain Pemerintah menertibkan dan memperindah tata keindahan kota. Pada sisi lain investor baik secara mandiri, maupun kerjasama dengan Pemerintah untuk membangun pasar-pasar teknologi modern.

Pemerintah Kota Pekanbaru (Pemko) memiliki kebijakan menjadikan kota Pekanbaru yang bersih dan tertib sesuai dengan program yang dimiliki Pemerintah yaitu K-3 tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha membuat kebijakan dan melakukan evaluasi untuk tetap menertibkan pedagang kaki lima. Pemerintah berusaha menyadarkan PKL melalui sosialisasi dengan cara menawarkan lokasi penampungan di pasar tertentu, yang dibangun sebagai alternatif. Namun kenyataannya yang terjadi dilapangan para PKL masih enggan untuk menempati pasar alternatif tersebut.

Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.
- 2) Untuk mewujudkan kerapian, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, Kepada Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 telah mengatur bahwa Dinas Pasar Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar. Dinas ini juga mempunyai kewenangan tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Salah satu pembinaan yang dilakukan Dinas Pasar yaitu menertibkan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas usahanya menggunakan badan jalan. Sehingga aktivitas ini mengganggu ketertiban umum.

Sebagai contoh, pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan Sub Dinas penertiban dan kebersihan adalah menyosialisasikan kepada para pedagang dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 250/511-2/DP-III/07). Surat edaran ini mempertegas Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 31 Tahun 2007 tanggal 2 Februari 2007 tentang penertiban PKL-sekota Pekanbaru. Surat tersebut ditujukan kepada para pedagang di areal Pasar Agus Salim, pasar Senapelan Teratai Atas, Simpang A. Yani, Sudirman dan sekitarnya. Dimana poin-poinnya adalah bahwa batas waktu yang telah ditentukan untuk menggelar dagangannya sampai pukul 07.00 Wib terhitung sejak tanggal 10 Maret 2007. Akan diambil tindakan tegas oleh petugas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kebijakan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap semua PKL, namun kenyataan yang terjadi di lapangan belum berhasil maksimal. Ini terlihat banyaknya para pedagang kaki lima yang belum mau pindah ke lokasi pasar yang telah disediakan Pemerintah. Perencanaan kebijakan Pemerintah dalam penertiban PKL sepertinya belum memberikan solusi tepat. Tampak kebijakan penertiban PKL dengan membangun pasar alternatif yang masih belum didukung sarana dan prasarana yang layak. Harga sewa Los dan Kios tinggi disamping belum adanya pemerataan penertiban PKL.

Menurut Budi Harsono (2003: 03) menjelaskan bahwa kebijakan dipandang sebagai perangkat-perangkat norma-norma sosial yang ditetapkan untuk memberi arah pelaku sistem. Kebijakan harus memperlihatkan faktor demografi dan kependudukan dengan segala akibatnya pada strategi pembangunan yang berbeda-beda. Kebijakan harus membangun sumber yang diperlukan untuk kebutuhan sektor penduduk yang beragam. akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda. Oleh karena itu tujuan pokok dari setiap kebijakan adalah menyediakan infrastruktur pada umumnya dan media serta khususnya yang paling sesuai kebutuhan bagi masyarakat. Ini perlu peningkatan kesadaran dari seluruh penduduk, bahwa perubahan kesadaran sangat penting. tidak mungkin menjadi monopoli media, tetapi harus dilakukan oleh para karyawan seperti guru, petugas kesehatan, penyuluh pertanian, para teknisi pengusaha dan lain sebagainya.

Implementasi kebijakan penertiban PKL dilakukan Dinas Pasar Kota Pekanbaru sesuai Perda No.5 tentang ketertiban umum implementasi dan

sosialisasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang umum dilakukan oleh Dinas Pasar adalah dengan melakukan patroli terutama di jalan sekitar Pasar Senapelan dan Agus Salim setiap hari. Pelaksanaan kebijakan dengan patroli ini dilakukan dengan upaya mengontrol agar PKL tidak menggunakan tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan. Khusus untuk Pasar Agus Salim Dinas Pasar melakukan sosialisasi penertiban setiap hari menggunakan 2 unit mobil Operasional Dinas Pasar untuk patroli setiap harinya. Tujuan patroli tersebut adalah untuk menertibkan pedagang yang berjualan yang menggunakan badan jalan, sehingga pengguna jalan tidak terganggu dengan aktivitas pedagang kaki lima. Tidak hanya itu, terkadang Pemerintah Kota melalui tim terpadu juga melakukan penertiban bagi pedagang yang berjualan di luar area jalan Agus Salim seperti jalan Sudirman dan jalan Ahmad Yani sekitar pukul 07.00 Wib.

Pada pasal 8 Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dinyatakan bahwa: Pengawasan pedagang kaki lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Dengan demikian, penertiban pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekanbaru adalah tugas Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sehingga aktivitas para pedagang tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tentang Ketertiban Umum ditegaskan bahwa: Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-



tempat hiburan umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Selain melakukan operasi tersebut Pemerintah Kota telah memberikan solusi dengan membangun 5 (lima) lokasi pasar sebagai lokasi penampungan untuk pedagang kaki lima. Lima lokasi pasar ini adalah pasar Senapelan terletak di jalan Ahmad Yani, pasar Infres Agus Salim di jalan Agus Salim, pasar Lima Puluh di jalan Sultan Syarif Kasim, pasar Labuh Baru di jalan Rumbai, dan pasar Rumbai. Lima pasar tersebut di arahkan sebagai lokasi penampungan untuk pedagang kaki lima yang masih berjualan di beberapa ruas jalan disudut Kota Pekanbaru.

Pasar Senapelan sebagai lokalisasi penampungan PKL sementara yang berjualan di jalan Teratai, Seroja dan Gang Istiqomah. Tujuan pembangunan pasar Senapelan merupakan strategi Pemerintah dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pedagang untuk menertibkan pedagang PKL yang berjualan sekitar pasar Senapelan agar terorganisir dan terencana serta dapat mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Sebelum pasar Senapelan dibangun dulu oleh Pemerintah Kota, sosialisasi dulu kepada pedagang untuk menyiapkan tempat penampungan sementara atau disebut tapak. Adapun tapak yang akan dibuat dalam tabel sebagai berikut:

## Daftar Tabel Pedagang Kios Dan Los Pasar Senapelan

**Tabel Tahun 2007**

<b>Nama Tempat</b>	<b>Nama Dagangan</b>	<b>Jumlah Orang</b>
- Kios	- Emas	33 orang
	- Pakaian	43 orang
	- Barang harian/sembako	83 orang
- Los terbuka	- Sayur mayur	76 orang
	- Ikan basah/kering	46 orang
	- Asongan	27 orang
<b>Jumlah</b>		<b>308 orang</b>

*Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru 2007*

Adapun tabel di atas dibuat sebagai bahan pertimbangan Pemerintah demi mewujudkan ekonomi keseimbangan masyarakat, sehingga kedepannya tujuan pembangunan pasar adalah ketertiban pedagang kaki lima. Pasar Senapelan dibangun sebagai lahan bisnis Pemerintah kepada pihak ketiga. Tanpa perencanaan ini harus berjalan lancar di dalam samping itu dibuatnya tempat penampungan sementara untuk menjaga ketertiban umum pedagang kaki lima, serta mewujudkan program K-3 (Keindahan, Ketertiban, Kenyamanan).

Pasar Senapelan adalah Program Pemerintah Kota untuk berupaya untuk mengembalikan fungsi jalan Teratai sebagai jalan umum. Kebijakan diambil adalah dengan membangun gedung Senapelan pada tahun 2005 sebagai lokasi

penampungan para pedagang. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan Kasubdis Penertiban dan Kebersihan Dinas sebagai berikut:

“Memberikan surat edaran No. 097/511.2/DP-1/2007 tertanggal Januari”

Berisikan, diberi tahukan kepada seluruh pedagang ikan basah pasar Senapelan sebagai berikut: pertama, pedagang ikan basah tidak dibenarkan berjualan pada tapak/meja yang ada di tanah Pemerintah dan badan jalan Teratai. Kedua, seluruh pedagang ikan basah supaya masuk pasar yang telah disediakan PT Peputra Maha Jaya, khusus pedagang sayur dan lainnya tidak dibenarkan memakai badan jalan, parit sebelum pembangunan pasar Senapelan yang baru ini bentuk sosialisasi Pemerintah Kota. Sumber Riau Pos, 3 Februari 2007.

Kebijakan dengan langkah kongkret ini memang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan program penertiban PKL melalui peremajaan pembangunan pasar bari. Kebijakan yang telah dilakukan ini kiranya berguna menampung para PKL masing-masing. Pasar tersebut adalah pasar Sail, pasar Bawah dan pasar Senapelan yang dijadikan pasar tradisional. Pasar ini dalam dalam pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga yang telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 113.366.001.740,- dan dua lokasi pasar tradisional lain melalui dana APBD Kota Pekanbaru yakni pasar Labuh Baru dengan alokasi dana sebesar Rp. 716.920.000,- dan untuk pasar Inpres Agus Salim sebesar Rp. 4.460.815.050,-. Kemudian ditambah dengan pasar Puja Sera Arifin Ahmad, pasar pagi Lima puluh dan pasar baru lainnya siap menampung pedagang kaki lima.

Pembangunan pasar dengan alokasi yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai wadah menampung pedagang kaki lima agar terencana, tertib dan teroganisir dengan baik. Kenyataan pembangunan dan peremajaan pasar yang dilakukan Pemerintah belum sesuai kebutuhan, keinginan dan kepentingan masyarakat, ketidak mampuan masyarakat, pedagang dari segi finansial tidak diperhatikan. Hal ini terlihat dari sewa gedung yang jauh dari jangkauan pedagang. Selain itu kesulitan yang dihadapi adalah akses ke pasar yang sulit, baik bagi pedagang maupun bagi masyarakat pembeli. Belum lagi konstruksi pembangunan pasar yang berlantai banyak, dengan tidak disertai fasilitas pendukung seperti parkir, akses ke lantai atas, dan fasilitas lainnya.

Setelah pembangunan pasar senapelan dikerjakan, PKL tetap juga melakukan aktivitas perekonomian dengan menggunakan badan jalan yakni jalan Teratai, Seroja, Gg. Istikomah. Pedagang kaki lima tidak mau pindah ke pasar Senapelan karena sewa los dan kios yang ditawarkan terlalu tinggi. Untuk harga satu kios di pasar Senapelan berkisar antara Rp. 63.000.000,- dengan uang pangkal Rp. 18.000.000,- kemudian untuk angsuran tiap tahunnya sebesar Rp.10.000.000,- (Riau Pos : 9 November 2006).

Mahal harga kios ini menyebabkan banyaknya ruang atau kios di pasar tersebut terbengkalai dan kosong khususnya yang ada dilantai tiga. Pasar Senapelan dibangun dengan kerja sama antara Pemerintah Kota dengan PT. Peputra Maha Jaya (PMJ). Dalam pengelolaan pasar senapelan tidak lagi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota melainkan langsung kepada PT. Peputra Maha Jaya harus membayar royalti kepada Pemerintah Kota sebesar

Rp.100.000.000,- setiap tahunnya selama masa kontrak 25 tahun ke depan terhitung pada tahun 2005. Hal inilah yang menyebabkan sewa kios dan los pasar Senapelan terlalu tinggi karena latar belakang pembangunan pasar Senapelan merupakan lahan bisnis antara Pemerintah dengan pihak ke tiga tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi PKL.

Perencanaan penertiban PKL oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini juga tidak konsisten terhadap program yang ada telah direncanakan yakni salah satunya mengenai Perda No. 5 Tahun 2005 tentang ketertiban umum. Salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang kaki lima selayaknya pasar-pasar resmi lainnya. Tindakan aparat Pemerintah Kota Pekanbaru menarik retribusi kepada pedagang kaki lima yang terlihat resmi dan memakai karcis ini melegalisasi PKL untuk tetap berdagang menggunakan badan jalan. Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan PKL masih belum maksimal dan belum konsisten dalam mengambil sikap dan keputusan.

Kenyataan dilapangan sangat berbeda dengan yang ada pada perencanaan yang telah dibuat. Keragu-raguan ini terkait juga dengan kurangnya koordinasi dengan dinas lainnya. Wewenangnya masih terbatas dan tanggungjawab terhadap permasalahan ketertiban dan kebersihan pasar itu sendiri. Tidak hanya di pasar Agus Salim, keadaan yang sama terjadi di jalan Soekarno Hatta Simpang Arengka Dinas Pasar juga melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang kaki lima setiap harinya. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas-dinasnya mengadakan pungutan retribusi kepada PKL melalui Dinas Pasar maupun Dinas Perhubungan.

Ini menunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak konsisten dan tidak berkoordinasi dengan baik.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang akan penulis tuangkan ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi sebagai penyelesaian tugas akhir penulis di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul :**“PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PASAR KOTA PEKANBARU” ( STUDY KASUS PASAR SENAPELAN)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Telah diketahui bersama bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai wujud untuk menertibkan pedagang kaki lima sebagai pusat perdagangan dalam memenuhi segala keperluan ekonomi masyarakat sehingga keberhasilan tugas Dinas Pasar tidak terlepas dari Pemerintah Kota beserta unsurnya yang memiliki tanggungjawab bersama dalam mewujudkan ketertiban, keindahan dan kenyamanan Kota Pekanbaru.

Keberhasilan suatu keteriban dan kebijakan pedagang kaki lima tidak terlepas dari Satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima sebagai suatu tolak ukur untuk membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata ketertiban, sehingga pihak pedagang mengerti berdagang dan berjualan ditempat kios atau los yang telah ada dibuat oleh Pemerintah Kota. Maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimanakah Perencanaan dan**

**Implementasi Kebijakan Pemko Pekanbaru terhadap Pedagang kaki lima di kota Pekanbaru?”** Berdasarkan rumusan masalah di atas dalam penertiban pedagang kaki lima Pemerintah sangat berperan aktif dalam menentukan kebijakan beberapa cara yaitu:

1. Pemerintah telah memberikan sifat teguran bersama Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima untuk segera pindah dari badan jalan ke tempat Kios dan Los yang telah ada untuk mewujudkan ketertiban umum, sehingga pasar Senapelan terlihat rapi dan indah.
2. Pemerintah melalui Dinas Pasar Kota Pekanbaru telah memberikan solusi baik kepada pedagang pasar Senapelan yang tidak sepakat dengan harga kios dan los yang sangat tinggi, padahal harga ini sangat sesuai dengan pasaran.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perencanaan kebijakan , penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar di pasar Senapelan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
- c. Untuk mewujudkan ketertiban umum oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

## **2. Sistematika Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi terkait terutama Dinas Pasar Sebagai bahan kajian dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota pekanbaru.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bahan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa penelitian khususnya penertiban pedagang.
2. Sumbangan pemikiran untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam masalah peningkatan, kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima.
3. Menambah referensi maupun informasi bagi peneliti yang bermaksud melaksanakan penelitian selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah gambaran dalam penulisan ini, akan digambarkan sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan di mana berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, berisikan hipotesa dan variabel penelitian.

## **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tipe penelitian, tempat atau lokasi penelitian, populasi sampel, teknik penarikan sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengukuran dan analisa data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM DINAS PASAR KOTA PEKANBARU BERISI TENTANG FUNGSI DINAS PASAR**

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang bagaimana perencanaan pemerintah kota bersama dinas pasar pekanbaru dalam melakukan perencanaan dan implementasi penertipan pedagang kaki lima (kasus pasar senapelan)

## **BAB VI : PENUTUP DAN KESIMPULAN**

Tentang penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan dinas pasar masih kurang efektif.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pemerintah Dalam Menentukan Kebijakan PKL**

Pasar adalah salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang sebagai tempat berusaha baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun oleh Pihak Swasta. (LAKIP Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 2006 : 1).

Selanjutnya diuraikan bahwa, untuk sarana pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan memberi wewenang Dinas Pasar sebagai pengelola pasar yang akan mengelola pasar yang nantinya dapat menampung aspirasi dari pedagang. (LAKIP Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 2006 : 1)

Setiap kebijakan Pemerintah Daerah, dalam penerapannya perlu dilakukan pengawasan sehingga tujuan kebijakan yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan, sebagaimana yang dinyatakan Handoko (1998 : 359 – 360) bahwa: Kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan.

Pasal 4 Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan Usaha di tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
  - c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap para Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yakni: “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)''.

Untuk mengetahui adanya kebijakan Pemerintah Kota adalah penertiban pedagang kaki lima, namun dibalik logika-logika penggusuran demi pembangunan tampaknya telah menjadi ideologi para penguasa. Diskriminasi dan disparitas antara kaum kaya dan miskin telah menjadi pemaksaan pembangunan selama ini. Sehingga kalau saja pembangunan tidak berhasil seperti dalam menangani persoalan pedagang kaki lima dalam penertiban kesemrautan kota lainnya, justru menjadi kembang hitamnya adalah mereka rakyat miskin dan pedagang kaki lima.

Menurut (Efendy Anong Ujitara 2003). Krisis ekonomi juga mengakibatkan makin banyak penduduk yang tidak mampu menjangkau pendidikan. Masalah lain yang selalu dihadapi ekonomi masyarakat selalu berkesinambungan terhadap orientasi akhlak dan moralitas dalam pembangunan kebijakan . Penerapan ilmu pengetahuan pengembangan teknologi sehingga belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya yang pada gilirannya menjadi hambatan dan kerjasama dalam persaingan global.

Berbicara tentang sektor perdagangan, maka tidak dapat lepas dari komunitas pedagang sebagai pelakunya, yang kemudian salah satunya dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima yaitu mereka yang bekerja dengan memanfaatkan situasi, tempat keramaian yaitu berjualan dibadan jalan trotoar atau tempat umum lainnya. Ini menandakan kebijakan pemerintah kurang ditanggap

oleh pedagang kaki lima sehingga implementasi antara pedagang dan pemerintah adalah kurang koordinasi secara terus menerus menurut (Sunandang Kustadi 2003: 19).

Menurut (Hasan Erliana, 2005). Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima ini dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Sehingga konsumen dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk semua barang harian. Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat senantiasa dipandang. Misalnya pusat kota, alun-alun, tempat keramaian hingga tempat-tempat nilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal lain. Di balik kehadiran para pedagang kaki lima tersebut ternyata dapat memberikan manfaat positif dan manfaat yang kurang menguntungkan. Manfaat yang positif mungkin dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah karena mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang terjangkau.

### **2.1.2. Kebijakan Pemerintah**

Untuk memenuhi definisi kebijakan pasar, berbagai konsep yang termuat dalam kebijakan pasar adalah:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang

Tindakan pasar adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata

Kebijakan pasar berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat.

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan

Kebijakan pasar bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Kebijakan pasar pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan pasar juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor

Kebijakan pasar berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan pasar bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. (Suharto, 2005: 44 – 45).

Kebijakan itu sendiri oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt didefinisikan sebagai berikut: kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh

konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah-laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. (Jones, 1991 : 47).

Sedangkan menurut Ibrahim (2004 : 2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijaksanaan.

Salah-satu bentuk kebijakan publik yang disusun pemerintah daerah sehubungan dengan tugas pokok pemerintahan tersebut diarahkan untuk terselenggaranya pelayanan publik untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat luas. Pelayanan publik oleh pemerintah daerah meliputi penyediaan jasa-jasa publik (*public services*) yang dibutuhkan masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupannya dengan kemampuan pemerintahan daerah tersebut.

Terlebih lagi dalam asas otonomi, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut selalu proaktif dalam menjalankan fungsi pelayanannya sehingga tercapai tujuan negara dalam rangka menciptakan pelayanan masyarakat secara efektif.

Menurut Moenir (1995 : 7), kebijakan adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan karena itu merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung inilah yang dinamakan pelayanan.

Selanjutnya Moenir juga mengatakan pelayanan administratif adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sedangkan pelayanan masyarakat atau *publik service* adalah berbagai kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang barang dan jasa (Pamudji, 1983 : 21).

### **2.1.3. Perizinan**

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang berlangsung sangatlah penting untuk terus ditingkatkan, terlebih lagi masa globalisasi dan industrialisasi. Pembangunan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental, dimana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Namun pada kenyataannya perkembangan tersebut telah membawa masalah terhadap kelestarian lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu pengendalian dari pihak-pihak yang terkait. Salah satu upaya yang telah dilakukan pengendalian oleh pihak pemerintah (penguasa) adalah melalui sistem perizinan.

Sebagaimana dijelaskan (Spelt dan Berge, 2000: 1) bahwa: “Tugas-Tugas Mengatur penguasa-penguasa, terutama menyangkut peraturan-peraturan yang harus di patuhi oleh para warga.” Contoh mengenai hal ini ialah ketertiban penguasa dalam perkembangan tata ruang. Dalam rangka tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan melarang dan melahirkan sistem-sistem perizinan.

Perizinan atau pemberian izin adalah perihal memberikan izin yang mana izin itu harus dimiliki oleh usaha/industri didalam mendirikan atau menjalankan usaha/industri nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin yang diberikan ini sekaligus merupakan persetujuan dari pihak yang



berwenang terhadap aktivitas pengelolaan dan pengusahaan dari pada bidang usaha/industri yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut.

Menurut (Spelt dan Berge, 2000: 3) bahwa izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Lebih lanjut (Spelt dan Berge, 2000: 10) menjelaskan bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

- a. Keinginan mengarahkan, mengendalikan (*struen*) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);

- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*Drack-en Horcawet*,” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). (Spelt dan Berge, 2000: 7-8)

Dengan demikian, izin dapat digunakan oleh pemerintah (penguasa) sebagai instrumen untuk mempengaruhi agar mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Namun kadang kala izin dapat disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu.

Instrumen izin digunakan oleh pemerintah (penguasa) pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan terutama bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang dan hukum perairan serta dalam hukum administrasi sosial, budaya dan kesehatan. Pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Sehubungan dengan perizinan, maka dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasa ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.
- 3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

- 4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apapun kepada siapapun.
- 5) Izin sebagaimana dimaksudkan ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
  - c. Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini tidak diberikan ganti rugi

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, yakni: “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)”

#### **2.1.4. Kerangka Berfikir**

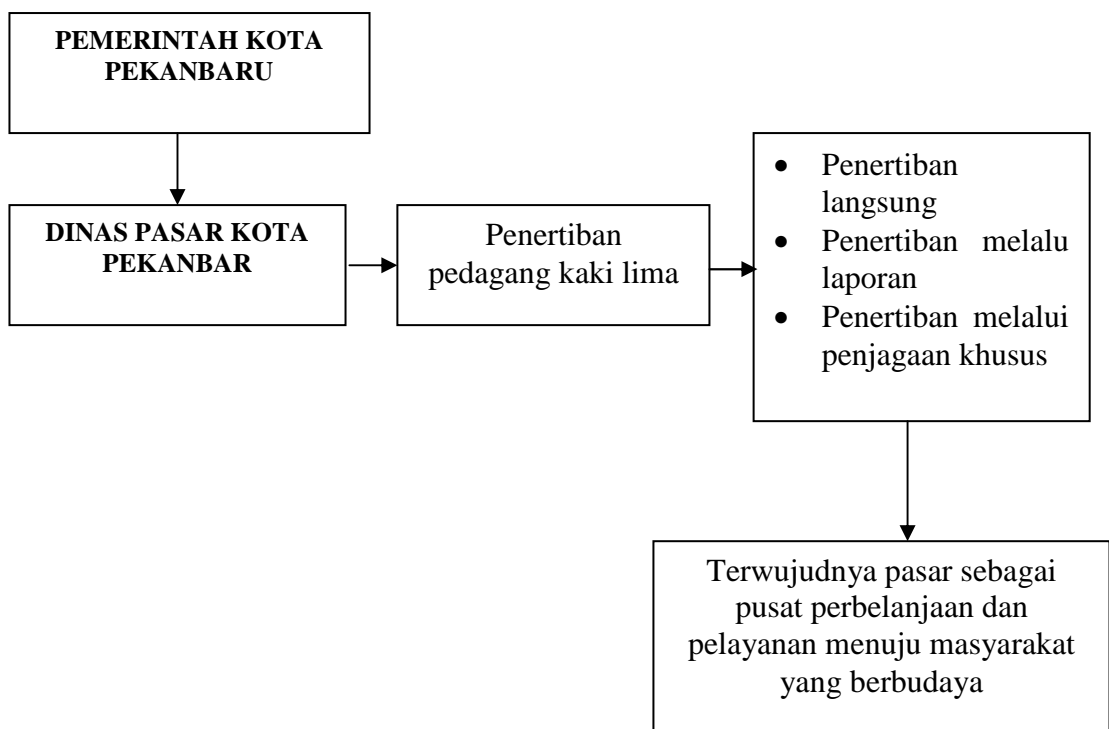
Kerangka berfikir ini adalah suatu konsep dalam menganalisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian tentang penertiban terhadap Pedagang kaki Lima di

kota Pekanbaru, sesuai dengan konsep maupun teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dijelaskan seperti gambar di bawah ini:

**Gambar II.1**

**Kerangka berfikir**



**Gambar: Struktur Susunan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Fungsi Dan Tujuan Dari Pasar**

## **2.2. Hipotesis**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan telaah pustaka di atas maka dapat ditarik suatu hipotesis di duga penertiban pedagang kaki lima oleh

Pemerintah dapat mewujudkan keindahan, ketertiban, kebersihan kota serta memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mencegah timbulnya konflik pedagang kaki lima dengan pemerintah.

### **2.3. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini dirumuskan dengan pedoman-pedoman teori-teori Pemerintahan yang terangkup dalam tinjauan pustaka meliputi:

1. Mencapai pengertian satu sama lain untuk tercapainya komunitas dua arah antara pemerintah kota pekanbaru dengan pedagang kaki lima.
2. Meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama baik Pemerintah dengan pedagang di masyarakat, mengurangi aspek negatif dan timbulnya konflik dan kecemburuan sosial, membina kepercayaan antara Pemerintah dengan pedagang masyarakat dalam mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi.

## 2.4. Operasional Variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut:

Konsep	Variabel	Dimensi/indikator	Item yang dinilai
Penertiban: Adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan, (Handoko, 1998: 359-360)	Penertiban pedagang kaki lima	1. Penertiban langsung  2. Penertiban melalui laporan  3. Penertiban melalui penjagaan khusus	a. Ketertiban b. Keamanan c. Kebersihana d. Kerapian e. Keindahan f. kesehatan lingkungan di sekitar tempat usaha/pasar  a. Pelaporan hasil penertiban secara lisan b. laporan hasil penertiban secara berkala  a. Melakukan pengendalian secara khusus terhadap para pedagang b. memberikan sanksi terhadap pedagang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

## 2.5. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur variabel pengawasan pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru, maka digunakan kriteria sebagai berikut:

Efektif : Apabila semua indikator variabel pengawasan pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru berada dalam kategori baik, dan total skor jawaban responden dari seluruh indikator mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila terdapat suatu indikator variabel pengawasan pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru berada dalam kategori tidak baik, dan total skor jawaban responden dari seluruh Indikator adalah antara 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila semua variabel pengawasan pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru berada dalam kategori tidak baik, dan total skor jawaban responden dari seluruh indikator mencapai  $\leq 33\%$ .

Kemudian kategori pengukuran untuk masing-masing indikator variabel penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung, terdiri dari:

a. Ketertiban tempat usaha, dikategorikan:

Efektif : Apabila setiap tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota selalu terpelihara dan terjaga ketertibannya, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila terdapat beberapa tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota belum terpelihara dan terjaga ketertibannya, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila setiap tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota belum

terpelihara dan terjaga keteribannya, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

b. Kemanan tempat usaha, dikategorikan:

Efektif : Apabila setiap tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota selalu terpelihara dan terjaga keamanannya, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila terdapat beberapa tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota belum terpelihara dan terjaga keamanannya, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila setiap tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota belum terpelihara dan terjaga keamanannya, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

c. Kebersihan tempat usaha, dikatagorikan:

Efektif : Apabila kebersihan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota selalu terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .



Kurang efektif : Apabila kebersihan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota sebagian belum terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila kebersihan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota belum terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

d. Kerapihan lingkungan tempat usaha, dikategorikan:

Efektif : Apabila kerapihan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota selalu terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila kerapihan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota sebagian belum terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila kerapihan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan

pihak Pemerintah Kota belum terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

e. Keindahan lingkungan tempat usaha, dikategorikan:

Efektif : Apabila keindahan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota selalu terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila keindahan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota sebagian belum terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila keindahan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota belum terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

f. Kesehatan lingkungan tempat usaha, dikategorikan:

Efektif : Apabila kesehatan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota selalu terpelihara dan terjaga

dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila kesehatan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota sebagian belum terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila kesehatan lingkungan sekitar setiap fasilitas tempat usaha pedagang Kaki Lima yang disediakan pihak Pemerintah Kota belum terpelihara dan terjaga dengan baik, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

2. Pengawasan melalui laporan, terdiri dari:

a. Pelaporan hasil pengawasan secara lisan, dikategorikan:

Efektif : Apabila setiap aparaturnya yang ditugaskan selalu memberikan pelaporan hasil pengawasan secara lisan tentang aktivitas pedagang Kaki Lima, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila setiap aparaturnya yang ditugaskan kadang-kadang tidak memberikan pelaporan hasil pengawasan secara lisan tentang aktivitas pedagang Kaki Lima, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila setiap aparaturnya yang ditugaskan tidak pernah memberikan pelaporan hasil pengawasan secara lisan tentang aktivitas pedagang Kaki Lima, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

b. Pelaporan hasil pengawasan secara berkala, dikategorikan:

Efektif : Apabila aparaturnya yang ditugaskan selalu memberikan pelaporan tertulis tentang aktivitas pedagang Kaki Lima secara berkala, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila aparaturnya yang ditugaskan kadang-kadang tidak memberikan pelaporan tertulis tentang aktivitas pedagang Kaki Lima secara berkala, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila setiap aparaturnya yang ditugaskan tidak pernah memberikan pelaporan tertulis tentang aktivitas pedagang Kaki Lima secara berkala, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

3. Pengawasan melalui penjagaan khusus, terdiri dari:

a. Melakukan pengendalian secara khusus terhadap para pedagang, dikategorikan:

Efektif : Apabila aparaturnya yang ditugaskan selalu melakukan pengendalian terhadap aktivitas para pedagang Kaki Lima secara berkala, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila aparaturnya yang ditugaskan kadang-kadang tidak melakukan pengendalian terhadap aktivitas para pedagang Kaki Lima secara berkala, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila aparaturnya yang ditugaskan tidak pernah melakukan pengendalian terhadap aktivitas para pedagang Kaki Lima secara berkala, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

b. Memberikan sanksi, dikategorikan:

Efektif : Apabila aparaturnya yang ditugaskan selalu memberikan sanksi bagi para pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan daerah, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\geq 67\%$ .

Kurang efektif : Apabila aparaturnya yang ditugaskan kadang-kadang tidak memberikan sanksi bagi para pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan daerah, dan persentase tanggapan responden mencapai 34 – 66%.

Tidak efektif : Apabila aparaturnya yang ditugaskan tidak pernah memberikan sanksi bagi para pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan daerah, dan persentase tanggapan responden mencapai  $\leq 67\%$ .

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru yaitu untuk mengetahui perencanaan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap pedagang kaki lima khususnya yang berada di pasar Senapelan, yang mana dinas ini adalah suatu instansi teknis yang bertugas membantu pemerintah kota dalam urusan pengelolaan pasar.

#### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden yang meliputi:
  - 1) Data hasil kuisioner tentang penerapan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Pasar di Kota Pekanbaru.
  - 2) Data hasil wawancara untuk memperjelas data yang diperoleh melalui kuisioner.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang sifatnya mendukung analisis pada penelitian ini, yang meliputi:
  - 1) Gambaran umum mengenai kantor dinas Pasar Kota Pekanbaru.
  - 2) Struktur organisasi Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
  - 3) Jumlah staf/pegawai Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- 1) Wawancara, yaitu memberikan pertanyaan secara langsung kepada pedagang kaki lima dan penjual lainnya sekitar pasar dalam penelitian.
- 2) Kuesioner, yaitu memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis terhadap pedagang kaki lima dan penjual lainnya sekitar pasar. Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16)
- 3) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang di teliti.

### **3.4. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **1) Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah

1. Pembuat dan kelanjutan Pemko dalam penertiban pedagang kaki lima
2. Pedagang kaki lima di pasar

#### **2) Sampel Penelitian**

Metode pengambilan sampel yang penulis guna memakai cara non probability sampling di mana dalam teknik ini jumlah atau ukuran sampel disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian. Spesifikasi dari metode penelitian ini digunakan peneliti adalah purposive sampling.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah terhadap bagi pedagang kaki lima dalam penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.



### **3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan cara mengungkapkan hasil penelitian dengan mendiskripsikan secara deduktif deskriptif, yaitu berupa uraian menggambarkan keadaan sesungguhnya dari objek penelitian yaitu gambaran yang komprehensif tentang dampak penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap sosial dan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PASAR KOTA PEKANBARU**

#### **4.1. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru**

Dinas pasar suatu instansi yang merupakan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu pemerintah kabupaten/kota dibidang pengolahan pasar, yang meliputi aktivitas pedagang kios, pedagang los, serta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Peranan pasar dewasa ini menjadi semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat perkotaan oleh berbagai jenis kegiatan usaha. Keberadaan Dinas ini sangat dibutuhkan untuk membina dan mengawasi serta mengatasi segala permasalahannya yang terjadi dilingkungan tempat usaha atau pasar. Terlebih lagi untuk mencapai Visi dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, yaitu: “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa pendidikan, serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.”

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa di tempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.

#### **4.2. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru**

Adapun susunan organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  
Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha:
  - Sub Bagian Umum/Perlengkapan
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Kepegawaian
- d. Sub Dinas Program:
  - Seksi Pendataan
  - Seksi Penyusunan Program
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  - Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- e. Sub Dinas Perencanaan Penelitian
  - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar
  - Seksi Penelitian dan Pengawasan Teknis Administrasi
- f. Sub Dinas Ketertiban dan Kebersihan Pasar
  - Seksi Ketertiban
  - Seksi Kebersihan pasar
- g. Sub Dinas Retribusi Pasar
  - Seksi Tata Usaha
  - Seksi Perhitungan dan Pendapatan Daerah

h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas kepala Dinas/Wakil kepala Dinas Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Wakil Kota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas:

Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang tugasnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, serta memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

2. Wakil kepala Dinas

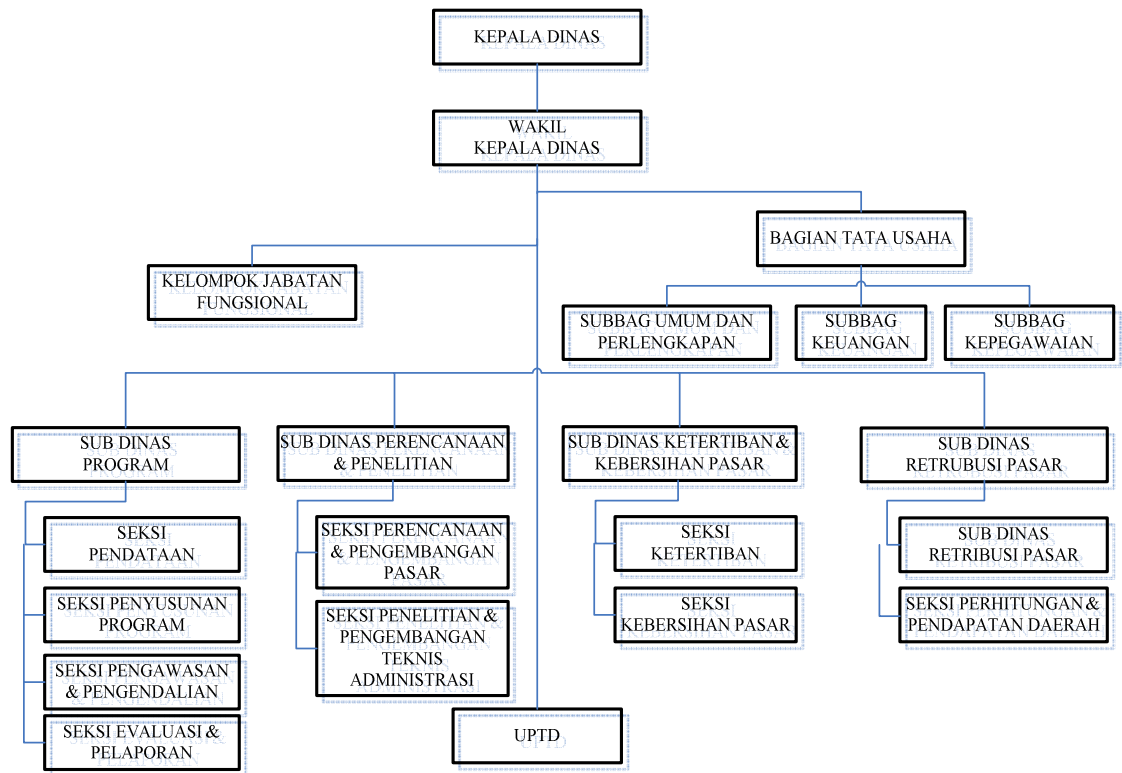
Mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajibannya.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan sub Dinas di lingkungannya.
- c. Menandatangani naskah dinas (keputusan satuan organisasi) tentang pembentukan Panitia Tim, kelompok kerja dan sejenisnya sepanjang bersifat penetapan (tidak bersifat mengatur atau membuat kebijakan) dan masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Menandatangani surat-surat yang tidak bersifat membuat kebijakan dan atau memberikan keputusan

- e. Menandatangani naskah dinas lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
- f. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Wakil Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas setiap minggu atau sesuai dengan kebutuhan
- h. Untuk melancarkan pelaksanaan tugasnya, Wakil Kepala Dinas berkonsultasi Kepada Kepala Dinas
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis
- j. Wakil Kepala Dinas melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Oerganisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti pada gambar IV.1 sebagai berikut:

Gambar struktur organisasi



Gambar Struktur Organisasi Susunan Jabatan Dan Fungsional Pasar Kota Pekanbaru.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Responden

Dalam penelitian ini responden yang digunakan secara keseluruhan adalah sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 10 orang Aparatur Pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru, serta 25 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktivitas berdagang di luar Pasar Senapelan Jl.Teratai.

Adapun identitas responden berdasarkan tingkat pendidikannya adalah seperti disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.1. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Formal**

Responden		Tingkat Pendidikan										Jumlah	
		SLTP		SLTA		DIII		S1		S2			
		f	%	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%
1.	Aparatur Pemerintah di Dinas Pasar	-	-	-	-	-	-	8	80,0	2	20,0	10	100,0
2.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	15	60,0	10	40,0	-	-	-	-	-	-	25	100,0
Jumlah		15	42,9	10	28,6	-	-	8	22,9	2	5,7	35	100,0

Sumer : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, dari 35 responden yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat sebanyak 15 orang atau 42,9% responden yang berpendidikan SLTP, 10 orang atau 28,6% responden yang berpendidikan SLTA, 8 orang atau 22,9% responden yang berpendidikan S1, dan 2 orang atau 5,7% responden yang berpendidikan S2. berdasarkan tabel di atas, maka sebagian besar responden penelitian ini adalah berpendidikan SLTA.

Dengan identitas berdasarkan pendidikan formal responden tersebut, maka responden penelitian ini pada umumnya telah memiliki tingkat pendidikan yang memadai untuk dapat digunakan sebagai responden dan dianggap cukup mampu memberikan jawaban atas keusioner yang diajukan, yang akan dipakai sebagai bahan analisis.

Kemudian identitas responden berdasarkan pengalaman kerjanya disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

Responden		Tingkat Pendidikan								Jumlah	
		< 25 Thn		25-35 Thn		36 – 45 Thn		> 45 Thn			
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Aparatur Pemerintah di Dinas Pasar	-	-	5	50,0	4	40,0	1	10,0	10	100,0
2.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	-	20	80,0	5	20,0	-	-	25	100,0
<b>Jumlah</b>		-	-	25	71,4	9	25,7	1	2,9	35	100,0

Sumber : Data Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 35 responden yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat sebanyak 25 orang atau 71,4% dari responden berumur 25 – 35 tahun, 9 orang atau 25,7% dari responden berumur 36 – 45 tahun, dan 1 orang atau 2,9% dari responden berumur > 45 tahun.

Kemudian identitas responden Aparatur Pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru disajikan seperti pada tabel di bawah ini :



**Tabel V.3. Identitas Responden Aparatur Pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru Berdasarkan Masa Kerja**

Masa Kerja		Responden	
		Jumlah	Persentase (%)
1.	< 5 Thn	-	-
2.	5 – 10 Thn	3	30,0
3.	11 – 15 Thn	5	50,0
4.	> 15 Thn	2	20,0
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 10 responden-responden Aparatur Pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang digunakan dalam penelitian ini, sebanyak 3 orang atau 30,0 dari responden telah memiliki masa kerja 5 – 10 tahun, sebanyak 5 orang atau 50,0% dari responden telah memiliki masa kerja 11 – 15 tahun, dan 2 orang atau 20,0% dari responden telah memiliki pengalaman kerja lebih dari > 15 tahun.

Dengan identitas responden berdasarkan masa kerja tersebut, maka responden penelitian tersebut yang digunakan pada umumnya telah memiliki pengalaman kerja yang cukup memadai sehingga dianggap dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan melalui kuesioner yang diajukan dalam penelitian ini.

## **5.2. Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru (“studi kasus pasar senapelan).**

Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima (PKL), maka pihak Pemerintah Kota,

untuk memudahkan kinerja pemko kota pekanbaru bersama dinas poasar pekanbaru, membuat tabel sebagai berikut di bawah ini:

**DAFTAR TABEL PERENCANAAN PENERTIBAN PKL DINAS PASA DI  
PASAR SENAPELAN**

<b>Instansi Dinas</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tempat Pedagang</b>
1. Dinas Pasar	- Melakukan penertiban pedagang kaki lima di pasar senapelan dalam mewujudkan kebersihan, keindahan, ketertiban sehingga pasar tampak bersih dan rapi.	- Kios - Los
2. Satpol PP Pekanbaru	Penertiban pedagang-pedagang liar yang menggunakan badan-badan jalan tetaratai sehingga menimbulkan kemacetan dalam lalulintas dan pengguna jalan lainnya.	- Badan jalan - Trotoar

Sumber Dinas: Pasar Pekanbaru.

memandang perlu adanya suatu kebijakan, sebab apabila hal ini tidak ditangani secara serius akan menimbulkan dampak negatif yang dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan di lingkungan perkotaan.

Maka dari itu melalui Dinas Pasar, pihak Pemerintah Kota telah berupaya melakukan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar yang ada, seperti yang dilakukan di Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Apabila Kota Pekanbaru merupakan daerah perkotaan yang cukup pesat perkembangannya khususnya dibidang industri dan perdagangan, sehingga selain telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakatnya, namun disisi lain juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang cukup serius.

Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Dinas Pasar Kota Pekanbaru, maka peneliti telah mengumpulkan data penelitian dari para responden dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan.

Adapun perencanaan dan implementasi kebijakan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru tersebut disajikan sebagai berikut:

#### **5.2.1. Penertiban Langsung**

Penertiban langsung yang dimaksud adalah pengawasan dalam penertiban yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam rangka mengawasi secara langsung untuk menertibkan aktivitas usaha para

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan lingkungan pasar sebagai tempat usahanya. Penertiban yang dilakukan adalah bertujuan untuk menjamin agar ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapihan, serta kesehatan lingkungan sekitar tempat usaha dapat dipelihara dengan baik.

Kegiatan penertiban ini dilakukan dikarenakan dengan tujuan agar aktivitas usaha yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak sampai mengganggu penataan kota yang telah diupayakan pemerintah dan tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas pengguna jalan di sekitar pasar yang digunakan para pedagang kaki lima tersebut.

Pada dasarnya sebelum kegiatan penertiban dilaksanakan, maka dilakukan penyusunan rencana kerja penertiban tersebut. Rencana kerja penertiban ini menjadi pedoman bagi aparat yang bertugas di lapangan. Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) pertama dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha para pedagang. Hal-hal yang ditertibkan antara lain adalah ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapihan, keindahan serta kesehatan lingkungan di sekitar tempat usaha atau pasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktivitas usaha di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru sebagai obyek penelitian. Pasar Senapelan Kota Pekanbaru ini merupakan salah satu pusat belanja masyarakat Kota Pekanbaru yang relatif cukup banyak terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan usaha yang memperdagangkan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Untuk mengetahui tentang penertiban langsung terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru tersebut, maka dapat dilihat analisis hasil tanggapan tentang masalah tersebut sebagai berikut:

**Tabel V.4. Rekapitulasi Tanggapan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tentang Penertiban Langsung oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Ketertiban	7	28,0	16	72,0	2	8,0	25	100,0
2.	Keamanan	8	32,0	17	68,0	-	-	25	100,0
3.	Kebersihan	5	20,0	18	72,0	2	8,0	25	100,0
4.	Kerapihan	4	16,0	20	80,0	1	4,0	25	100,0
5.	Keindahan	5	20,0	20	80,0	-	-	25	100,0
6.	Kesehatan	3	12,0	21	84,0	1	4,0	25	100,0
Jumlah		32	21,3	112	74,7	6	4,0	150	100,0
Rata-rata		5	20,0	19	76,0	1	4,0	25	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 orang responden para Pedagang Kaki Lima (PKL), sebanyak rata-rata 5 orang atau 20,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif, 19 orang atau 76,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori kurang efektif, dan 1 orang atau 4,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif.

Dengan demikian, sebagian besar tanggapan responden tentang penertiban langsung terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Dinas Pasar adalah masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan sistem penertiban yang dilakukan aparaturnya dari Dinas Pasar yang dibantu oleh para petugas Satuan Polisi

Pamong Praja masih kurang mampu menimbulkan kesadaran dan kepedulian bagi para pedagang pada umumnya untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota. Akibatnya masih banyak diantara para pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang telah dilarang dan membuang sampah sembarangan tidak pada tempat yang telah disediakan.

Sedangkan rekapitulasi tanggapan responden Aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru tentang penertiban langsung yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru tersebut, adalah sebagai berikut:

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Ketertiban	6	60,0	3	30,0	1	10,0	10	100,0
2.	Keamanan	8	80,0	2	20,0	-	-	10	100,0
3.	Kebersihan	7	70,0	2	20,0	1	10,0	10	100,0
4.	Kerapihan	6	60,0	3	30,0	1	10,0	10	100,0
5.	Keindahan	7	70,0	3	30,0	-	-	10	100,0
6.	Kesehatan	8	80,0	1	10,0	1	10,0	10	100,0
Jumlah		42	70,0	14	23,3	4	6,7	60	100,0
Rata-rata		7	70,0	2	20,0	1	10,0	10	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden Aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru, sebanyak rata-rata 7 orang atau 70,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif, 2 orang atau 20,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori kurang efektif, dan 1 orang atau 10,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif. Dengan menurut responden tersebut pengawasan secara langsung yang dilakukan Dinas Pasar telah efektif.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa bentuk penertiban yang dilakukan terhadap aktivitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan lingkungan sekitar pasar adalah dengan cara mengawasi langsung ke lapangan baik secara persuasif maupun dengan menertibkan secara langsung terhadap para pedagang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah kota.

Kemudian untuk mengetahui penertiban secara langsung yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dilakukan rekapitulasi seluruh tanggapan responden dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan aparatur Dinas Pasar sebagai berikut:

**Tabel V.6. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban Langsung Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Ketertiban Kaki Lima (PKL)	5	20,0	19	76,0	1	4,0	25	100,0
2.	Aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru	7	70,0	2	20,0	1	10,0	10	100,0
Jumlah		12	34,3	21	60,0	2	5,7	35	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, dari 35 orang responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dan aparatur Dinas Pasar yang digunakan dalam penelitian ini, sebanyak 12 orang atau 34,3% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif, 21 orang atau 60,0% dari responden memberi tanggapan

pada kategori kurang efektif, dan 2 orang atau 5,7% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penertiban langsung yang dilakukan Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kurang efektif.

Hal ini dikarenakan kadang-kadang masih terjadi gangguan terhadap lalu lintas pengguna jalan serta terjadinya kesemerautan di lingkungan tempat berdagang yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha para Pedagang Kaki Lima (PKL). Di samping itu, kondisi kebersihan, kerapihan dan keindahan lingkungan temoat usaha pada Pedagang Kaki Lima (PKL) masih belum dapat dikendalikan secara maksimal.

### **5.2.2. Penertiban Melalui Laporan**

Penertiban melalui laporan yang dimaksud adalah suatu proses dalam rangka mengawasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu dengan mengumpulkan laporan-laporan dari para bawahan yang telah ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penertiban di lapangan. Laporan yang diberikan baik secara lisan maupun tertulis yang dipersiapkan secara rutin sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan secara lisan maupun secara tertulis yang diberikan bawahan yang bertugas tersebut mengenai aktivitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Pasar adalah sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut atau sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.



Untuk mengetahui penertiban melalui laporan yang dilakukan oleh aparaturn Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dilakukan analisis sebagai berikut:

**Tabel V.7. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) Tentang Penertiban Melalui Laporan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pelaporan hasil penertiban secara lisan	5	20,0	18	72,0	2	8,0	25	100,0
2.	Pelaporan hasil penertiban secara tertulis	7	28,0	14	56,0	4	16.0	25	100,0
Jumlah		12	24,0	32	64,0	6	12,0	50	100,0
Rata-rata		6	24,0	16	64,0	3	12,0	25	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 25 orang responden para Pedagang Kaki Lima (PKL), sebanyak rata-rata 6 orang atau 24,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif, 16 orang atau 64,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori kurang efektif, dan 3 orang atau 12,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif. Dengan demikian, sebagai besar tanggapan responden tentang penertiban melalui laporan yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan laporan yang diberikan mengenai aktivitas yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di tempat usaha di sekitar lingkungan pasar masih kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya di

lapangan sehingga atasan tidak dapat mengambil tindakan yang tepat dalam rangka melakukan penataan pasar.

Sedangkan rekapitulasi tanggapan responden aparatur Dinas Pasar tentang penertiban melalui laporan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), adalah sebagai berikut:

**Tabel V.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban Melalui Laporan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pelaporan hasil penertiban secara lisan	7	70,0	3	30,0	-	-	10	100,0
2.	Pelaporan hasil penertiban secara tertulis	9	90,0	1	10,0	-	-	10	100,0
Jumlah		16	80,0	4	20,0	-	-	20	100,0
Rata-rata		8	80,0	2	20,0	-	-	10	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 10 orang responden Aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru, sebanyak rata-rata 8 orang atau 80,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif dan 2 orang atau 20,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori kurang efektif, dan tidak seorangpun responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif. Dengan demikian, menurut responden tersebut bahwa penertiban melalui laporan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sudah efektif.

Kemudian dari hasil wawancara dengan aparatur Pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan melalui laporan adalah dengan mengumpulkan laporan mengenai pelaksanaan tugas para bawahan selama bertugas mengawasi para pedagang di tempat usaha di lingkungan pasar. Laporan yang diterima adalah secara lisan dan secara tertulis yang disajikan secara rutin dalam kurun waktu tertentu.

Kemudian untuk mengetahui penertiban melalui laporan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dilakukan rekapitulasi seluruh tanggapan responden dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan aparatur Dinas Pasar sebagai berikut:

**Tabel V.9. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban Melalui laporan Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	6	24,0	16	64,0	3	12,0	25	100,0
2.	Aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru	8	80,0	2	20,0	-	-	10	100,0
Jumlah		14	40,0	18	51,4	3	8,6	35	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, dari 35 orang responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dan aparatur Dinas Pasar yang digunakan dalam penelitian ini, sebanyak 14 orang atau 40,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif, 18 orang atau 51,4% dari responden memberi tanggapan

pada kategori kurang efektif, dan 3 orang atau 8,6% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penertiban melalui laporan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kurang efektif.

### **5.2.3. Penertiban dengan kebijakan Khusus**

Penertiban dengan kebijakan Khusus yang dimaksud adalah suatu proses penertiban dan pemeriksaan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktivitas berdagang di lingkungan sekitar pasar yang dilakukan secara khusus pada waktu tertentu. Hal ini dilakukan berdasarkan perintah yang diberikan atasan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari bawahan tentang hasil penertiban di lingkungan pasar.

Melakukan penertiban dengan kebijakan khusus ini dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diketahui melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota mengenai tempat usaha dan aktivitas berdagang bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan sekitar pasar.

Untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh para aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui kebijakan khusus, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

**Tabel V.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL)**  
**Tentang kebijakan dengan Penertiban Khusus oleh Dinas Pasar**  
**Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pengendalian secara khusus terhadap pedagang	4	16,0	20	80,0	1	4,0	25	100,0
2.	Memberikan sanksi terhadap para pedagang	6	24,0	16	64,0	3	12,0	25	100,0
Jumlah		10	20,0	18	72,0	2	8,0	25	100,0
Rata-rata		5	20,0	18	72,0	2	8,0	25	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 25 orang responden para Pedagang Kaki Lima (PKL), sebanyak rata-rata 5 orang atau 20,0% dari reaseponden memberi tanggapan pada kategori efektif, 18 orang atau 72,0% dari dari responden memberi tanggapan pada kategori kurang efektif, dan 2 orang atau 8,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif.

Dengan demikian, sebagian besar tanggapan responden tentang penertiban melalui kebijakan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan kegiatan penertiban dengan penjagaan khusus terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan kadang-kadang terlalu menunjukkan sifat arogan dari aparaturnya yang bertugas baik dalam melakukan pemeriksaan di lapangan maupun dalam

memberikan sanksi terhadap para pedagang yang melanggar ketentuan pemerintah kota.

Sedangkan tanggapan responden aparatur Dinas Pasar tentang penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui kebijakan khusus, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

**Tabel V.11. Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban dengan kebijakan Khusus oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pengendalian secara khusus terhadap pedagang	9	90,0	1	10,0	-	-	10	100,0
2.	Memberikan sanksi terhadap para pedagang	7	80,0	1	20,0	1	10,0	10	100,0
Jumlah		16	80,0	2	10,0	0,5	5,0	20	100,0
Rata-rata		8	80,0	1	10,0	1	10,0	10	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 10 orang responden aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru sebanyak rata-rata 8 orang atau 80,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif, 1 orang atau 10,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori kurang efektif, dan 1 orang atau 10,0% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif. Dengan demikian, penertiban melalui kebijakan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah efektif.

Kemudian dari hasil wawancara dengan aparatur Pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa kegiatan penertiban dengan kebijakan khusus yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), dan kemudian menjatuhkan sanksi bagi para pedagang yang melanggar ketentuan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditetapkan pemerintah kota.

Kemudian untuk mengetahui penertiban melalui kebijakan khusus yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dilakukan rekapitulasi seluruh tanggapan responden dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan aparatur Dinas Pasar sebagai berikut:

**Tabel V.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban Melalui kebijakan Khusus Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	5	20,0	18	72,0	2	8,0	25	100,0
2.	Aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru	8	80,0	1	10,0	1	10,0	10	100,0
Jumlah		13	37,1	19	54,3	3	8,6	35	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, dari 35 orang responden Pedagang Kaki Lima (PKL) dan aparatur Dinas Pasar yang digunakan dalam penelitian ini, sebanyak 13 orang atau 37,1% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif, 19 orang atau 54,3% dari responden memberi tanggapan

pada kategori kurang efektif, dan 3 orang atau 8,6% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penertiban melalui kebijakan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kurang efektif.

Untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh aparaturnya Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dilakukan rekapitulasi seluruh tanggapan responden dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Aparatur Dinas Pasar sebagai berikut:

**Tabel V.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru**

Sub Indikator		Kategori Jawaban						Jumlah	
		Efektif		Kurang efektif		Tidak efektif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Penertiban langsung	12	34,3	21	60,0	2	5,7	35	100,0
2.	Penertiban melalui laporan	14	40,0	18	51,4	3	8,6	35	100,0
3.	Penertiban melalui kebijakan khusus	13	37,1	19	54,3	3	8,6	35	100,0
Jumlah		39	37,1	58	55,2	8	7,6	105	100,0
Rata-rata		13	37,1	19,3	55,2	2,7	7,6	35	100,0

Sumber : Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, dari 35 orang responden para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Aparatur Dinas Pasar Kota Pekanbaru, rata-rata terdapat 37,1% dari responden memberi tanggapan pada kategori efektif, dan 7,6% dari responden memberi tanggapan pada kategori tidak efektif. Dengan



demikian, sebagian besar tanggapan responden tentang pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Pasar adalah pada kategori kurang efektif.

Hal ini berarti menunjukkan bahwa kegiatan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Dinas Pasar masih kurang efektif, baik dari segi penertiban langsung, penertiban melalui laporan maupun penertiban yang dilakukan dengan cara kebijakan khusus terhadap aktivitas pedagang.

### **5.3. Kendala yang Dihadapi Dinas Pasar dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru**

Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar merupakan kebijakan yang cukup penting dalam pengendalian aktivitas para pedagang yang beroperasi di pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, pihak Pemerintah Kota harus melaksanakan penertiban secara efektif dalam penerapan kebijakan tersebut.

Namun demikian, masih dijumpai beberapa kendala dalam penerapannya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan pihak Aparatur Dinas Pasar antara lain adalah:

1. Aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penertiban para pedagang relatif sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah pedagang yang di tertibkan sehingga penertiban yang dilakukan kurang efektif.

2. Rencana kerja yang disusun dalam pelaksanaan kegiatan penertiban kurang efektif dan efisien sehingga tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam kegiatan penertiban.
3. Masih sulitnya untuk penerapan sanksi secara tegas terhadap para pedagang yang melanggar ketentuan Walikota terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga ketertiban, kebersihan, dan sebagainya dapat dikendalikan secara maksimal.
4. Masih rendahnya kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah kota untuk penataan dan pembinaan lingkungan tempat usaha para pedagang tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Berdasarkan dari hasil rekapitulasi keseluruhan tanggapan responden tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah masih kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih kurang efektif.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar dalam Perencanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain adalah:
  - a. Aparatur Penertib yang bertugas sebagai pegawai fungsional di Dinas Pasar masih kurang memiliki kemampuan kerja yang memadai dibandingkan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi dan objek/para pedagang yang akan ditertibkan, serta jumlahnya relatif sedikit dibandingkan jumlah pedagang yang diawasi.
  - b. Rencana kerja yang disusun dalam pelaksanaan kegiatan penertiban kurang efektif dan efisien sehingga tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam kegiatan penertiban.
  - c. Masih sulitnya untuk penerapan sanksi secara tegas terhadap para pedagang yang melanggar ketentuan Walikota terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga ketertiban, kebersihan, dan

sebagainya di lingkungan tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dapat dikendalikan secara maksimal.

- d. Masih rendahnya kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah kota untuk penataan dan pembinaan lingkungan tempat usaha para pedagang tersebut.

## **6.2. Saran**

Agar penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat terlaksana secara efektif sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan Pemerintah Kota di masa mendatang, maka sebaiknya:

- a. Aparatur yang bertugas sebagai penertib para Pedagang Kaki Lima (PKL) hendaknya lebih ditingkatkan baik jumlahnya dengan merekrut pegawai petugas penertib dari pegawai baru maupun pegawai yang sudah ada di instansi terkait, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme kerjanya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terarah dan terpadu.
- b. Pihak pimpinan instansi/Dinas hendaknya memberikan bimbingan dan pengarahan yang lebih intensif kepada para aparatur yang ditugaskan sebagai penertib yang ada untuk menunjang pelaksanaan kerja aparatur tersebut di lapangan.
- c. Memberikan pengarahan dan sanksi yang tegas bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru bagi para pedagang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Harsono, Suyuti S., 2003, *Politik* , Grasindo Jakarta.
- Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 2006. *LAKIP Dinas Pasar Kota Pekanbaru Tahun 2006*, Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Efendy, Anong Uchjana, 2003, *Ilmu Teori dan Filsafat* , Citra Adhitya Bakti Bandung.
- Handoko, T. Hani., DR. *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1998.
- Ibrahim, Amin, 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Jakarta, Rajawali Press.
- Moenir. A.S, 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moicong, Lexy, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara Bandung.
- Nawawi, H. Hadari, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan 11, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Pamudji, Suparni, 1985. *Ekologi Administrasi Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sunandang, Kustadi, 2004, *Public Relation Perusahaan, Kajian Program Implementasi*, Nuansa Bandung.
- Suharto, Edi, Ph.D., 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung, Alfabeta.
- Suryaningrat, Bayu, 1987, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jones, charles, O., 1991. *Pengantar kebijakan publik (publik policy)* Jakarta, Rajawali Press
- Ibrahim, Amin, 2004, *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju.
- Ndraha, Tailiziduhu, 2003, *Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid, I Jakarta, Rineka Cipta.

### Perundangan-Undangan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 *telah mengatur bahwa Dinas Pasar Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar.*

Perda No.5 *tentang ketertiban umum implementasi dan sosialisasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang umum dilakukan oleh Dinas Pasar adalah dengan melakukan patroli terutama dijalan sekitar Pasar Senapelan dan Agus Salim setiap hari. Pelaksanaan kebijakan dengan patroli ini dilakukan dengan upaya mengontrol agar PKL tidak menggunakan tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan.*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Pekanbaru.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pedagang Kios Dan Los Pasar Senapelan Tahun 2007 .....	6
Tabel 2.1	Operasional Variabel .....	26
Tabel 5.1	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	44
Tabel 5.2	Identitas Responden Aparatur Pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekabaru Berdasarkan Masa Kerja .....	45
Tabel 5.3	Rekapitulasi Tanggapan Pedangan Kaki Lima (PKL) Tentang Penertiban Langsung Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	49
Tabel 5.4	Rekapitulis Tanggapan Responden Pedagang kaki lima (PKL) dan Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban Langsung Terhadap Pedangan Kaki lima (PKL) .....	51
Tabel 5.5	Rekapitulis Tanggapan Responden Pedagang kaki lima (PKL) Tentang Penertiban Melalui Laporan Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedangan Kaki Lima (PKL) .....	53
Tabel 5.6	Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban Melalui Laporan Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedangan Kaki Lima (PKL) .....	54
Tabel 5.7	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedanga Kaki Lima (PKL) Tentang Kebijakan Dengan Penerapan Khusus Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	57
Tabel 5.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pasar Tentnag Penertiban Melalui Laporan Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima .....	54
Tabel 5.9	rekapitulasi tanggapan responden pedangan kaki lima (PKL) dan Aparatur dinas pasar tentang penertiban melalui laoran terhadap pedangna kaki lima (PKL) .....	55

Tabel 5.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden Kaki Lima (PKL) Tentang Kebijakan Dengan Penertiban Khusus Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedangan Kaki Lima .....	57
Tabel 5.11	Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban Dengan Kebijakan Khusus Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	58
Tabel 5.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden Kaki Lima (PKL) dan Aparatur Dinas Pasar Tentang Penertiban Melalui Kebijakan Khusus Terhadap Pedangan Kaki Lima (PKL) .....	59
Tabel 5.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penertiban Pedangna Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru .....	60